

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aprilianti., Kasmawati. 2022. *Hukum Adat di Indonesia*.
- Bambang Satriya. 2013. *Problematisa Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: *Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*.
- Eugen Ehrlich. 2009. *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*. Oxford: Hart Publishing Ltd.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Edisi Revisi, Bandung: Masdar Maju.
- I Made Widnyana. 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Cetakan Pertama. Bandung: Eresco.
- Iman Sudiyat. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat* Bekal Pengantar. Yogyakarta. Wignjodipuro. 1979. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni
- Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Agung.
- Mardjono Reksodiputra. 2001. *Pembaruan Hukum Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Alumni.
- Moh. Koesnoe dalam Siti Soendari. 1996. *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalnya Menghadapi Era Globalisasi*. Surabaya: Ubhara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rudy. Rudi Wijaya. Muhammad Amin Putra. 2022. *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.
- R. Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terj. A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju.
- Rendi Wirahadi Kusuma. 2025. *Pengantar Hukum Adat: Konsep, Sejarah, dan Karakteristik Dasar*
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sunaryati Hartono. 1998. Sumbangsih Hukum bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dalam M. Syamudin et al Editor: *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. FH-UII.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Suriyaman Mustari Pide. 2015. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.

- Tolib Setiadi. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Eresco.
- Wignjodipuro Soerojo. 1979. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung. Alumni.
- Windia Wayan P. dan Sudantra Ketut. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*.
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT Eresco.
- Zainuddin Tika dan M. Ridwan Syam. 2007. *Silariang dan Kisah-Kisah Siri*. Makassar: Pustaka Refleksi.

JURNAL :

- Apriyani. 2018. *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*. Vol 6. No.3.
- Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang. 2016. *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Ade Putra Hendrawan. "Eksistensi Silariang, Hukum Adat Suku Bugis-Makassar." Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- David Nelken. 2008. "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities." *Theoretical Inquiries in Law*.
- Dewa Ayu Devi Purnami, I Wayan Kertih, I Putu Windu Mertha Sujana, 2025, Menelisik Tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia Ditinjau Dari Perspektif UUD RI 1945 dan HAM.
- Evelyna Hasibun. Meiske T. Sondakh. Deine R. Ringkuangan. 2021. Eksistensi Pidana Adat dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Analisis Konsepsi Rancangan KUHP).
- Edy Ikhsan. 2015. "Land Tenure of the Malay People in North Sumatera: From Normative Trap to the Historical Denial." *Hasanuddin Law Review*.
- Fery Kurniawan. 2016. Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Eduka Jurnal Pendidikan. Hukum dan bisnis* 2.
- Helnawaty. 2017. Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Universitas Gunadarma.
- Heru Harianto. Pluralisme Hukum di Indonesia. Universitas Ekasakti.
- Herman, dkk. 2023. Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Husna, S. K. I., dan Najicha, F. U. 2023. "Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Kadek Agus Sukrada. Drs. Dewa Bagus Sanjaya M.Si. Ratna Artha Windari, S.H.,M.H. 2013. Sanksi Kasapekang Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Desa Pakraman Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- La Syarifuddin. 2019. Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana.
- Martono Anggusti. Debora Tambunan. Juita Sari Manalu. 2024. Penegakan Asas Legalitas Terhadap Living Law Sebagai Dasar Hukum dalam Positivisme Pemindahan Hukum Adat.
- Mohsi. 2020. Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Murtir Jeddawi. Abdul Rahman. 2020. Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah.
- Nurlaila Isima. 2022. Urgensi Pengakuan Hukum yang Hidup pada Masyarakat dalam Asas Legalitas Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

- Warih Anjari. 2017. Eksistensi Delik Adat dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus.
- Yoserwan Yoserwan. 2023. Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. UNES Law Review.
- Yanis Maladi. 2012. Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

TESIS :

- Andi Nur Fikriana Aulia Raden. 2021. "Konsep Siri' Sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam Dalam Budaya Lokal Pada Masyarakat Bugis Bone." Tesis Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.